

BAB II

MENGURAI KEPENTINGAN NASIONAL DIBALIK KEBIJAKAN KONTROVERSIAL CINA DI XINJIANG

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai detail sejarah dan geografis Xinjiang yang berkaitan dengan penerapan kebijakan represif yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina disana. Hal ini diikuti dengan penyajian data yang menjelaskan bagaimana detail kebijakan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan motif kepentingan ekonomi Cina yang juga melandasi kebijakan represif yang diterapkan. Kemudian pembahasan terakhir di bab ini adalah menjelaskan kenyataan bahwa dalam dunia internasional yang anarki ini, tidak ada entitas yang bisa mengatur dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Xinjiang.

2.1 Xinjiang dan Sejarah Kekerasan

2.1.1 Signifikansi Wilayah Xinjiang

Wilayah Xinjiang, yang berarti "Perbatasan Baru" dalam bahasa Mandarin, memiliki sejarah yang panjang sebagai persimpangan peradaban dan kekuatan politik. Sebelum menjadi bagian dari Cina, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk masyarakat Turki kuno dan Iran, yang menciptakan mosaik budaya yang unik. Pada masa awal, Xinjiang merupakan pusat perdagangan yang penting dalam jaringan Jalur Sutra kuno. Jalur ini menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa, menjadikan Xinjiang sebagai jalur strategis untuk perdagangan barang, ide, dan budaya. Wilayah ini juga menjadi titik persilangan agama, dengan kehadiran Buddha, Zoroastrianisme, Islam, dan Kristen Nestorian pada berbagai periode sejarahnya (Millward, 2007).

Pada abad ke-8, Islam mulai masuk ke Xinjiang melalui pedagang dan misionaris dari Asia Tengah. Seiring waktu, Islam menjadi agama mayoritas di wilayah ini, terutama di kalangan masyarakat Uighur yang secara perlahan mendominasi budaya lokal. Uighur sendiri adalah etnis Turki yang mulai menetap di wilayah Xinjiang setelah migrasi besar-besaran pada abad ke-9, menggantikan dominasi masyarakat Indo-Eropa yang sebelumnya mendiami daerah tersebut. Identitas Uighur mulai terbentuk melalui integrasi budaya Turki, Persia, dan Islam, yang terus berlanjut hingga era modern (Clarke, 2011).



Gambar 2. 1 Muslim Uighur
Sumber: Uighur Association, 2024

Kemunculan Xinjiang sebagai wilayah geopolitik yang penting juga dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan antara berbagai kekaisaran. Pada abad ke-13, Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan menguasai wilayah ini dan memasukkannya ke dalam jaringan kekaisaran terbesar pada masa itu. Setelah pecahnya Kekaisaran Mongol, wilayah ini terbagi menjadi beberapa kekhanan yang saling bersaing, termasuk Kekhanan Zunghar yang memainkan peran signifikan

pada abad ke-17 dan 18. Kekhanan Zunghar berhasil menguasai sebagian besar wilayah Xinjiang hingga akhirnya ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1759 (Millward, 2007).

Setelah menaklukkan Xinjiang, Dinasti Qing menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kendali atas wilayah yang luas ini. Qing menerapkan kebijakan militerisasi dan kolonisasi untuk memperkuat cengkeramannya, tetapi menghadapi pemberontakan yang terus-menerus dari masyarakat lokal, terutama dari Uighur dan kelompok etnis lainnya. Pemberontakan besar, seperti Pemberontakan Dungan pada abad ke-19, menyoroti ketegangan yang terus-menerus antara kekuasaan Qing dan penduduk lokal. Pada tahun 1884, setelah berhasil memadamkan pemberontakan, Dinasti Qing secara resmi mendeklarasikan Xinjiang sebagai provinsi, mengintegrasikannya ke dalam struktur administratif Cina (Clarke, 2011).

Pada abad ke-20, Xinjiang menjadi ajang perebutan kekuasaan antara Cina, Rusia, dan berbagai gerakan nasionalis lokal. Setelah jatuhnya Dinasti Qing pada tahun 1911, wilayah ini mengalami periode ketidakstabilan dengan munculnya gerakan separatis yang dipimpin oleh masyarakat Uighur dan Kazakh. Salah satu puncaknya adalah pembentukan Republik Turkestan Timur pada tahun 1933 dan 1944, meskipun kedua republik ini hanya bertahan sebentar akibat tekanan dari pemerintah pusat Cina dan pengaruh Uni Soviet (Millward, 2007).

Setelah berdirinya Tiongkok pada tahun 1949, Xinjiang kembali berada di bawah kendali penuh Beijing. Pemerintah komunis Cina menetapkan Xinjiang sebagai daerah otonomi pada tahun 1955, mengakui keanekaragaman etnis di

wilayah tersebut. Namun, dengan munculnya kebijakan migrasi besar-besaran etnis Han ke Xinjiang, identitas lokal mulai terpinggirkan. Ketegangan antara Beijing dan masyarakat Uighur meningkat, yang pada akhirnya menjadi akar dari konflik yang terus berlanjut hingga saat ini (Roberts, 2020).

Xinjiang merupakan wilayah terbesar di Tiongkok dengan luas sekitar 1,6 juta kilometer persegi, yang mencakup hampir seperenam dari total luas daratan Cina. Terletak di bagian barat laut negara tersebut, Xinjiang berbatasan langsung dengan delapan negara: Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Posisi strategis ini menjadikan Xinjiang sebagai jembatan geografis antara Cina dan kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, serta Eropa. Secara geografis, wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan besar seperti Pegunungan Tian Shan, Pegunungan Kunlun, dan Pegunungan Altai, sementara di tengahnya terbentang Gurun Taklamakan, salah satu gurun terbesar di dunia (Millward, 2007).



Gambar 2. 2 Peta wilayah Xinjiang
Sumber: BBC, 2024

Wilayah ini juga mencakup Lembah Tarim dan Danau Bosten, yang merupakan sumber daya air utama di kawasan yang didominasi oleh iklim kering. Meskipun sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun dan pegunungan, Xinjiang memiliki beberapa oasis subur yang mendukung kegiatan pertanian tradisional, terutama di sekitar kota-kota seperti Kashgar, Turpan, dan Urumqi. Karakter geografis ini membuat Xinjiang menjadi wilayah yang unik, tetapi juga penuh tantangan dalam hal pembangunan dan pengelolaan sumber daya (Clarke, 2011).

Xinjiang dikenal memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam hal sumber daya alam. Wilayah ini kaya akan cadangan energi, termasuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Xinjiang merupakan komponen penting dari keamanan energi dan strategi ekonomi Cina. Wilayah ini mengandung sekitar 30% dari total cadangan minyak dan gas Cina yang menjadikannya kontributor signifikan bagi produksi energi domestik negara tersebut. Xinjiang juga memainkan peran utama dalam upaya Cina untuk mendiversifikasi sumber dan rute energi, khususnya melalui integrasinya ke dalam *Belt and Road Initiative* (BRI). Cadangan dan posisi geografis wilayah ini mendukung proyek infrastruktur utama, termasuk jaringan pipa yang menghubungkan Asia Tengah ke Cina timur (Reale et al., 2020)

Peran Xinjiang dalam energi melampaui ekstraksi sumber daya. Wilayah ini juga sedang dikembangkan sebagai pusat produksi dan ekspor produk energi olahan. Perusahaan minyak milik negara Cina telah berinvestasi besar di wilayah tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mengamankan pasokan energi, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan

sengketa perdagangan (Maizland & Lute, 2022). Selain itu, wilayah ini memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, terutama energi angin dan tenaga surya, yang mulai dimanfaatkan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa tempat seperti Gurun Taklamakan memiliki potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga surya karena tingkat radiasi matahari yang tinggi (Roberts, 2020).

Selain energi, Xinjiang juga kaya akan sumber daya mineral seperti emas, tembaga, nikel, dan uranium. Potensi ini membuat wilayah tersebut menjadi salah satu pusat eksplorasi tambang di Cina. Tidak hanya itu, Xinjiang juga memiliki lahan pertanian yang subur di sekitar oasis, memungkinkan produksi kapas dalam jumlah besar. Xinjiang adalah produsen kapas terbesar di Cina, yang menjadi komoditas penting dalam rantai pasok tekstil domestik dan internasional. Namun, eksploitasi sumber daya ini sering kali menjadi isu kontroversial karena terkait dengan tuduhan kerja paksa terhadap etnis minoritas lokal (Zenz, 2019).

Daerah Otonomi Uighur Xinjiang atau yang dikenal dengan *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR) merupakan salah satu dari lima daerah otonomi di Cina yang secara resmi dirancang untuk memberikan hak-hak khusus kepada kelompok etnis minoritas. Secara konstitusional, daerah otonomi di Cina diberikan hak-hak tertentu untuk mengelola urusan lokal, termasuk hak untuk mengakomodasi kebutuhan budaya (seperti menggunakan bahasa daerah dan memelihara budaya setempat), sosial, dan politik etnis minoritas, seperti Uighur, Kazakh, dan Hui. Namun, dalam implementasinya, sistem pemerintahan di Xinjiang mencerminkan dominasi pusat oleh Partai Komunis Cina (PKC), dengan pengawasan ketat dari Beijing.

Meskipun disebut sebagai daerah otonom, banyak kebijakan yang diterapkan di Xinjiang disusun dan diarahkan oleh pemerintah pusat. Pada kenyataannya pemerintah pusat di Beijing sangat mendominasi pengelolaan daerah ini. Sekretaris Partai Komunis Cina (PKC) untuk XUAR adalah figur paling berkuasa di wilayah ini, dan biasanya berasal dari etnis Han. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusan strategis lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat daripada pejabat lokal Uighur yang menduduki posisi simbolis seperti Ketua Daerah Otonomi. Hal ini mencerminkan pola pengelolaan Cina di daerah otonomi lainnya, di mana pemimpin partai memiliki otoritas lebih besar dibandingkan pejabat pemerintah lokal (Millward, 2007).

Pemerintahan di XUAR mengikuti struktur administratif khas Cina yang sangat terpusat. Pemerintah lokal di Xinjiang diatur berdasarkan hierarki yang terdiri dari tingkat daerah, prefektur, kabupaten, dan desa, dengan pengawasan langsung dari komite partai di setiap tingkatan. Pengaruh Beijing terlihat jelas dalam pengambilan keputusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan-kebijakan nasional, termasuk program pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan program pendidikan. Namun, banyak kebijakan ini dikritik sebagai alat untuk asimilasi budaya terhadap populasi Uighur. Contohnya, program pendidikan sering menggantikan bahasa Uighur dengan Mandarin sebagai bahasa utama pengajaran, yang bertentangan dengan prinsip otonomi budaya yang dijamin secara hukum (Roberts, 2020).

2.1.2 Sejarah Pemberontakan dan Kekerasan di Xinjiang

2.1.2.1 Periode Sebelum Abad ke-20

Wilayah Xinjiang, yang kini terletak di barat laut Cina, memiliki sejarah panjang pemberontakan sebelum abad ke-20, yang mencerminkan dinamika kompleks antara kekuasaan pusat dan masyarakat lokal. Pada pertengahan abad ke-18, Dinasti Qing berhasil menaklukkan Xinjiang dari Kekhanan Dzungar, mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam kekaisaran Tiongkok. Namun, kebijakan Qing yang menekan praktik keagamaan dan budaya lokal memicu ketidakpuasan di kalangan penduduk Muslim, terutama etnis Uighur. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-19 dengan meletusnya Pemberontakan Dungan (1862–1877), yang dipicu oleh desas-desus tentang rencana pembantaian massal terhadap komunitas Muslim oleh otoritas Qing (Wawasan Sejarah, 2017).

Pemberontakan ini meluas ke berbagai kota di Xinjiang, dengan tokoh seperti Yakub Beg, seorang petualang dari Khokand, memimpin perlawanan dan mendirikan kekuasaan independen di Kashgaria. Namun, pada akhir 1870-an, Jenderal Zuo Zongtang dari Qing berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mengembalikan Xinjiang ke dalam kendali kekaisaran. Selain itu, pada abad ke-12, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Liao Barat dan kemudian jatuh ke tangan Mongol di bawah Jenghis Khan pada abad ke-13. Proses Islamisasi yang signifikan terjadi pada pertengahan abad ke-14 ketika Tughluk Timur Khan, seorang penguasa keturunan Mongol, memeluk Islam, yang berdampak besar pada identitas budaya dan agama etnis Uighur. Sejarah pemberontakan di Xinjiang

sebelum abad ke-20 menunjukkan resistensi masyarakat lokal terhadap dominasi eksternal dan upaya mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan agama di tengah tekanan politik dan militer (Alatas, 2018).

1.1.2.2 Periode Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, Xinjiang menjadi arena pergolakan politik dan etnis yang signifikan. Setelah runtuhnya Dinasti Qing pada 1911, kekuasaan di wilayah ini dipegang oleh para panglima perang lokal. Salah satu yang paling menonjol adalah Yang Zengxin, yang memerintah hingga 1928. Kepemimpinannya ditandai dengan stabilitas relatif, tetapi juga dengan penindasan terhadap aspirasi etnis minoritas, khususnya Uighur. Setelah kematiannya, Sheng Shicai mengambil alih kekuasaan dan awalnya bersekutu dengan Uni Soviet, yang memberikan pengaruh besar dalam politik Xinjiang. Namun, kebijakan represifnya terhadap kelompok etnis dan agama menimbulkan ketidakpuasan luas. (Wei, 2021)

Pada 1933, ketegangan ini memuncak dengan pendirian Republik Turkestan Timur Pertama di Kashgar oleh kelompok Uighur dan etnis Muslim lainnya. Meskipun hanya bertahan singkat, republik ini mencerminkan keinginan kuat untuk otonomi dan identitas terpisah dari Cina. Namun, dengan dukungan Uni Soviet, Sheng Shicai berhasil menumpas gerakan ini pada 1934. Pada 1944, pemberontakan serupa terjadi di wilayah Ili, yang dikenal sebagai Pemberontakan Ili. Didukung oleh Uni Soviet, pemberontakan ini menghasilkan pendirian Republik Turkestan Timur Kedua, yang menguasai wilayah Ili, Tarbagatay, dan Altay di Xinjiang utara. Konflik ini berakhir dengan pembentukan pemerintahan koalisi antara Republik Turkestan Timur dan Republik Tiongkok pada 1946, meskipun ketegangan tetap

berlanjut hingga integrasi penuh Xinjiang ke dalam Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 (Wei, 2021).

Selama periode ini, peran Uni Soviet sangat signifikan dalam mendukung gerakan separatis di Xinjiang, baik melalui bantuan militer maupun politik. Motivasi Soviet didorong oleh kepentingan geopolitik untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tengah dan melemahkan kontrol Pemerintah Cina di wilayah perbatasannya. Namun, intervensi ini juga menimbulkan kompleksitas dalam hubungan internasional dan dinamika internal di Xinjiang (Wei, 2021).

Setelah integrasi Xinjiang ke dalam Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, wilayah ini mengalami serangkaian ketegangan dan pemberontakan yang mencerminkan ketidakpuasan etnis Uighur terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pada awal 1950-an, beberapa pemimpin Uighur mengorganisir serangan terhadap Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), namun upaya ini berhasil dipadamkan. Pada tahun 1951, gerakan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata kembali muncul, tetapi sekali lagi ditindas oleh PLA. Pada tahun 1952, retorika agama mulai terjalin dalam upaya pemberontakan, dengan kelompok Pan-Turki diduga mendirikan "Partai Perikatan Islam" untuk merencanakan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah, sementara pemimpin Uighur lain membentuk dan memimpin "tentara agama" untuk bangkit menentang Partai Komunis Cina (Rahman, 2021).

Selama periode ini, Pemerintah Cina menerapkan kebijakan migrasi etnis Han ke Xinjiang sebagai upaya untuk menyeimbangkan tekanan separatis dari kelompok Uighur. Antara tahun 1950 hingga 1978, sekitar tiga juta orang etnis Han pindah ke wilayah tersebut, meningkatkan proporsi mereka dari 5% pada tahun

1949 menjadi sekitar 40% pada tahun 1978. Kebijakan ini menyebabkan orang Uighur merasa menjadi asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Selain itu, pemerintah memberlakukan pembatasan ekspresi keagamaan, termasuk larangan praktik keagamaan pribadi di semua struktur yang dikendalikan negara, serta larangan bagi siswa di sekolah negeri dan universitas untuk beribadah atau menunjukkan perilaku keagamaan (Rahman, 2021).

Pada tahun 1990, ketegangan mencapai puncaknya dengan terjadinya Pemberontakan Barin di Kabupaten Akto, Prefektur Kizilsu. Sekitar 200 hingga 300 pria Uighur bersenjata melakukan serangan terhadap kantor pemerintah setempat sebagai protes terhadap dugaan aborsi paksa terhadap wanita Uighur dan dominasi Cina di Xinjiang. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pasukan pemerintah setelah beberapa hari pertempuran, dengan korban jiwa di kedua belah pihak. Peristiwa ini menandai titik balik dalam kebijakan Pemerintah Cina, yang kemudian memperketat kontrol dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut (Rahman, 2021).

1.1.2.3 Periode Abad ke-21

Ketegangan meningkat drastis pada dekade 2000-an dengan insiden-insiden besar seperti kerusuhan Urumqi tahun 2009. Peristiwa ini bermula dari bentrokan antara etnis Uighur dan Han di ibu kota Xinjiang, yang dipicu oleh laporan pelecehan terhadap pekerja Uighur di sebuah pabrik di Guangdong. Insiden ini menyebar ke Urumqi setelah protes damai oleh Uighur yang menuntut penyelidikan atas insiden tersebut berubah menjadi kerusuhan massal. Dalam waktu singkat,

kekerasan meningkat, dengan laporan tentang perusakan properti, penyerangan fisik, dan pembakaran di jalan-jalan kota (Millward, 2020).

Menurut data resmi Pemerintah Cina, kerusuhan ini mengakibatkan 197 orang tewas dan lebih dari 1.700 lainnya terluka. Sebagian besar korban adalah etnis Han, meskipun korban dari kelompok Uighur juga tercatat. Pemerintah Cina menuduh Kongres Uighur Sedunia, sebuah organisasi di pengasingan yang dipimpin oleh Rebiya Kadeer, sebagai dalang di balik kerusuhan ini. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh organisasi tersebut, yang menyatakan bahwa kerusuhan adalah respons terhadap kebijakan represif pemerintah terhadap Uighur di Xinjiang. Sebagai respons terhadap kerusuhan, pemerintah memberlakukan tindakan keras, termasuk pengiriman ribuan pasukan tambahan ke Urumqi dan penangkapan lebih dari 1.000 orang yang diduga terlibat. Pemerintah juga memutuskan layanan internet dan komunikasi telepon di wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran informasi dan organisasi protes lebih lanjut (Millward, 2020).

Antara tahun 2011 dan 2014, wilayah Xinjiang, khususnya kota Kashgar dan Hotan, mengalami serangkaian insiden kekerasan yang meningkatkan ketegangan etnis dan politik di kawasan tersebut. Serangan-serangan ini, yang sebagian besar dilakukan oleh individu atau kelompok yang diduga terkait dengan gerakan separatis Uighur, menyoroti tantangan yang dihadapi Pemerintah Cina dalam menjaga stabilitas di wilayah yang multietnis ini.

Pada 30 dan 31 Juli 2011, Kashgar menjadi lokasi serangkaian serangan yang menewaskan 15 orang dan melukai 42 lainnya. Serangan pertama melibatkan dua pria Uighur yang membajak truk, membunuh sopirnya, dan menabrakkan truk

tersebut ke kerumunan pejalan kaki. Setelah itu, mereka keluar dari truk dan menikam enam orang hingga tewas serta melukai 27 lainnya. Serangan kedua terjadi pada 31 Juli, ketika sekelompok pria bersenjata melemparkan bahan peledak ke dalam restoran yang ramai, menyebabkan kebakaran dan menewaskan enam orang, termasuk dua di antaranya adalah warga Han. Kelompok yang bertanggung jawab, East Turkestan Islamic Movement (ETIM), mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini pada 8 September 2011 (Wei & Yinan, 2011).

Pada 18 Juli 2011, serangan terjadi di Hotan, di mana sekelompok 18 pria muda Uighur menyerang kantor polisi di Jalan Nuerbage. Mereka membunuh dua petugas keamanan dengan pisau dan bahan peledak, serta menyandera delapan orang. Para penyerang kemudian mengganti bendera Cina dengan bendera lain yang identitasnya diperdebatkan. Setelah baku tembak dengan polisi, 14 penyerang tewas, empat ditangkap, dan dua sandera tewas. Pemerintah Cina menyatakan bahwa serangan ini merupakan tindakan terorisme yang diorganisir dan dipicu oleh ekstremisme agama (Wei & Yinan, 2011).

Selanjutnya adalah Serangan Stasiun Kereta Kunming pada 1 Maret 2014. Insiden ini terjadi di Stasiun Kereta Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, di mana sekelompok pria bersenjata yang diyakini merupakan anggota kelompok separatis Uighur, menyerang para penumpang yang sedang berada di dalam stasiun dengan pisau dan parang. Para penyerang melukai lebih dari 140 orang dan menewaskan 31 orang, dengan sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata.

Serangan ini berlangsung sekitar satu jam dan menyebabkan kepanikan besar. Para penyerang menggunakan pisau dan parang besar untuk melakukan

serangan, yang menambah rasa ketakutan dan kepanikan yang melanda stasiun tersebut. Pemerintah Cina segera menyatakan bahwa ini adalah serangan teroris yang direncanakan, yang didalangi oleh kelompok separatis Uighur, khususnya kelompok yang disebut-sebut berafiliasi dengan *East Turkestan Islamic Movement* atau ETIM (Roberts, 2020).

Terdapat beberapa nama tokoh Uighur yang di “klaim” sebagai dalang provokasi di balik sejumlah aksi protes dan kerusuhan yang terjadi di Xinjiang. Salah satu tokoh yang sering disorot adalah Rebiya Kadeer, seorang mantan pengusaha sukses dan aktivis hak asasi manusia Uighur. Sebelumnya, Kadeer pernah menjadi anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC) sebelum akhirnya berselisih dengan pemerintah. Setelah beremigrasi ke Amerika Serikat, ia menjadi Presiden Kongres Uighur Sedunia (*World Uyghur Congress*) dan aktif mengkritik kebijakan Pemerintah Cina terhadap Uighur. Pemerintah Cina menuduhnya sebagai provokator utama di balik kerusuhan besar di Xinjiang, termasuk Kerusuhan Urumqi 2009, meskipun Kadeer membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa ia mendukung gerakan damai (Zenz, 2018).

Tokoh lainnya adalah Ilham Tohti, seorang akademisi dan ekonom yang dikenal karena upayanya membangun dialog antar etnis melalui situs *Uyghur Online*. Tohti kerap menyerukan penyelesaian damai atas konflik di Xinjiang, tetapi pada tahun 2014, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan separatisme. Pemerintah Cina menuduhnya menghasut kebencian etnis dan menginspirasi aksi-aksi separatis di Xinjiang. Penangkapan Tohti menuai kritik dari

komunitas internasional, yang memandangnya sebagai upaya Cina untuk membungkam suara moderat di antara komunitas Uighur (Zenz, 2018).

Selain itu, Abdurehim Heyit, seorang musisi dan penyair terkenal, juga ditahan oleh Pemerintah Cina. Karya-karyanya, yang menggunakan alat musik tradisional Uighur seperti dutar, dianggap mengandung pesan separatis yang berpotensi memprovokasi ketegangan etnis. Penahanan Heyit menarik perhatian internasional, karena ia dianggap sebagai simbol upaya Cina untuk menghapuskan ekspresi budaya Uighur melalui kebijakan represif. Pemerintah Cina menganggap tokoh-tokoh ini sebagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan berbagai tuduhan seperti separatisme dan provokasi, pemerintah berusaha menekan segala bentuk perlawanan, baik yang bersifat politik, budaya, maupun ideologis. Namun, tuduhan tersebut sering kali dipandang sebagai upaya untuk membungkam kritik dan memperketat kontrol terhadap wilayah Xinjiang (Zenz, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina mengadopsi kebijakan yang semakin represif terhadap Uighur, termasuk pendirian kamp-kamp "*re-education*" yang oleh pemerintah disebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan". Kamp-kamp ini diklaim bertujuan untuk memberantas ekstremisme, namun laporan internasional menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai alat pengawasan massal, indoktrinasi politik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini, yang dimulai sejak 2017, diiringi dengan penggunaan teknologi pengawasan canggih dan pembatasan ketat terhadap praktik keagamaan serta budaya Uighur. Kebijakan ini

memicu kritik global tetapi terus diterapkan oleh Pemerintah Cina atas dasar menjaga stabilitas dan integrasi nasional (Zenz, 2019).

2.1.3 Kebijakan Represif di Xinjiang

Kebijakan represif Pemerintah Cina di Xinjiang memiliki akar sejarah yang panjang, tetapi intensitasnya meningkat signifikan sejak awal abad ke-21. Upaya pengendalian ketat terhadap wilayah ini sebagian besar dipicu oleh ketegangan etnis yang berlarut-larut dan kekhawatiran Pemerintah Cina terhadap separatisme. Xinjiang, rumah bagi mayoritas etnis Uighur dan kelompok etnis lain seperti Kazakh dan Hui, telah lama menjadi kawasan yang rentan terhadap konflik etnis dan ideologis akibat sejarah kolonialisme, kebijakan migrasi etnis Han, serta tekanan ekonomi dan budaya (Millward, 2007).

Setelah serangkaian kerusuhan etnis dan serangan yang diklaim oleh kelompok separatis Uighur, Pemerintah Cina mulai memperkuat kontrolnya. Salah satu peristiwa kunci yang memicu kebijakan represif modern adalah kerusuhan di Urumqi pada Juli 2009, di mana bentrokan antara etnis Uighur dan Han mengakibatkan ratusan korban jiwa. Insiden ini dianggap sebagai "titik balik" dalam pendekatan Beijing terhadap Xinjiang, yang kemudian menempatkan stabilitas dan keamanan sebagai prioritas utama (Clarke, 2011).

Kerusuhan di Xinjiang pada Juli 2009, yang dikenal sebagai “Kerusuhan Urumqi”, adalah salah satu konflik etnis paling parah di Cina modern. Insiden ini bermula pada 5 Juli 2009 di ibu kota Xinjiang, Urumqi dan melibatkan bentrokan besar antara etnis Uighur dan Han. Konflik ini menewaskan sedikitnya 197 orang dan melukai lebih dari 1.700 lainnya menurut laporan resmi Pemerintah Cina,

meskipun jumlah korban sebenarnya diperdebatkan oleh berbagai sumber. Kerusuhan ini mencerminkan ketegangan mendalam yang telah lama terjadi di wilayah tersebut akibat kebijakan diskriminatif pemerintah terhadap etnis Uighur.

Kerusuhan ini dipicu oleh insiden di sebuah pabrik mainan di Shaoguan, provinsi Guangdong, pada Juni 2009. Pekerja migran Uighur dituduh memerkosa seorang perempuan Han, meskipun tuduhan itu kemudian terbukti tidak benar. Tuduhan ini memicu bentrokan antara pekerja Uighur dan Han yang menyebabkan dua orang Uighur tewas. Berita tentang insiden ini menyebar ke Xinjiang dan memicu kemarahan di kalangan masyarakat Uighur, yang merasa bahwa pemerintah tidak melindungi mereka dan secara sistematis mendiskriminasi hak-hak mereka (Clarke, 2011).

Di Urumqi, demonstrasi damai oleh ribuan Uighur yang menuntut penyelidikan insiden Shaoguan berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menggunakan kekuatan untuk membubarkan massa. Aksi ini kemudian meluas menjadi kekerasan antar etnis, termasuk pembakaran toko, penyerangan, dan penjarahan properti.



Gambar 2. 3 Kerugamsuhan demonstrasi di Urumqi 2009

Sumber: *International Consortium of Investigative Journalists*, 24024

Pada 5 Juli 2009, protes awalnya berjalan damai, tetapi ketegangan meningkat ketika aparat menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Dalam waktu singkat, bentrokan meluas antara masyarakat Uighur dan Han. Sebagian besar korban berasal dari etnis Han, tetapi komunitas Uighur mengklaim bahwa mereka juga menjadi target tindakan keras aparat keamanan setelah kerusuhan. Pemerintah Cina menyalahkan kelompok Uighur sebagai pelaku utama kekerasan dan menuduh organisasi seperti *World Uyghur Congress* yang berbasis di luar negeri sebagai dalang kerusuhan. Namun, organisasi tersebut membantah tuduhan tersebut dan menuduh Pemerintah Cina memanipulasi narasi untuk membenarkan tindakan represif terhadap Uighur (Roberts, 2020).

Setelah kerusuhan, Pemerintah Cina memberlakukan jam malam, memobilisasi ribuan polisi dan tentara, serta memutus akses internet di Xinjiang untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap dapat memicu kekacauan lebih lanjut. Ribuan orang Uighur ditangkap, dan banyak yang dilaporkan mengalami penahanan tanpa proses pengadilan yang jelas. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan keamanan dan memperketat kontrol terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Uighur (Mackinnon, 2020).

Kerusuhan Urumqi menandai eskalasi kebijakan keras Pemerintah Cina di Xinjiang. Setelah insiden ini, Beijing memperkenalkan kebijakan pengawasan teknologi tinggi, pembangunan kamp pendidikan ulang, dan program "pemberantasan ekstremisme." Ketegangan etnis di Xinjiang semakin diperburuk, dengan komunitas Uighur merasa teralienasi dan kehilangan kepercayaan terhadap

pemerintah. Di sisi lain, Cina terkesan menggunakan kerusuhan ini sebagai pembenaran untuk memperkuat cengkraman politik dan ekonominya di wilayah tersebut, termasuk dengan mendorong program *Belt and Road Initiative* (BRI) yang memanfaatkan Xinjiang sebagai jalur strategis (Zenz, 2019).

Penerapan kebijakan represif di Xinjiang menjadi lebih terorganisir dan sistematis di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping. Laporan menunjukkan bahwa setelah Xi berkunjung ke Xinjiang pada 2014, terjadi pergeseran menuju kebijakan yang lebih agresif, mencakup tindakan "pemberantasan separatisme" dan "re-edukasi ideologis." Dalam kunjungan tersebut, Xi dilaporkan menekankan pentingnya stabilitas sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional, dan kebijakan berikutnya mencerminkan pendekatan ini (Zenz, 2019).

Setelah insiden serangan di Kunming pada 2014, yang disebut oleh pemerintah sebagai serangan "teroris" oleh separatis Uighur, langkah-langkah keamanan diperluas secara drastis. Pemerintah Cina mulai membangun kamp-kamp pendidikan ulang, yang secara resmi disebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan." Kamp ini dirancang untuk mendidik ulang etnis minoritas dalam ideologi negara, menghilangkan identitas keagamaan dan budaya yang dianggap ekstremis, dan memastikan kesetiaan terhadap Partai Komunis Cina. Namun, kamp ini dituduh sebagai fasilitas interniran massal oleh organisasi hak asasi manusia internasional (Roberts, 2020).



Gambar 2. 4 Bangunan yang dianggap sebagai “pusat pendidikan ulang” di Xinjiang

Sumber: *International Consortium of Investigative Journalists*, 2024

Selain tindakan represif langsung, Xinjiang menjadi lokasi uji coba teknologi pengawasan canggih, termasuk kamera dengan pengenalan wajah, aplikasi pelacak komunikasi, dan analisis data besar untuk memonitor aktivitas penduduk. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi separatisme dan "ekstremisme," tetapi juga digunakan untuk mengontrol aktivitas sehari-hari masyarakat Uighur. Proyek pengawasan ini mencerminkan pergeseran Pemerintah Cina ke arah pendekatan teknologi tinggi dalam mengelola ketegangan domestik (Mackinnon, 2020).

2.2 Great Power Cina dan Perkembangan Ekonominya

2.2.1 Sejarah Great Power Cina

Cina yang kita kenal sebagai salah satu *great power* di dunia, memiliki sejarah panjang sebagai salah satu peradaban besar dunia. Dalam berbagai periode sejarahnya, negara ini telah menjadi kekuatan regional yang dominan. Namun, dalam perjalanan Cina untuk menjadi *great power*, dalam konteks modern

merupakan hasil dari evolusi panjang yang melibatkan kebangkitan, kejatuhan dan kebangkitan kembali.

Sejarah Cina sebagai kekuatan besar dimulai sejak Dinasti Han (206 SM-220 M), yang menjadi salah satu kekaisaran paling kuat di dunia pada masanya. Dinasti Han mengembangkan sistem administrasi yang canggih, perdagangan internasional melalui jalur sutra dan pengaruh budaya yang meluas ke Asia Timur dan Tengah. Pada masa Dinasti Tang (618–907 M) dan Dinasti Song (960–1279 M), Cina mencapai puncak kejayaan dalam bidang teknologi, ekonomi dan budaya yang menjadikannya pusat perdagangan dan inovasi global (Fairbank & Goldman, 2006). Namun, kejatuhan Dinasti Ming (1368-1644) dan invasi asing pada era Dinasti Qing (1644-1912) melemahkan kekuatan Cina. Kekalahan dalam Perang Opium (1839–1842, 1856–1860) dan kolonisasi ekonomi oleh negara-negara Barat menjadikan Cina “setengah jajahan” dan mengakhiri masa kejayaan sebagai kekuatan global.

Setelah kejatuhan Dinasti Qing pada 1912, Cina mengalami periode ketidakstabilan politik yang panjang, termasuk perang saudara (1927–1949) dan pendudukan Jepang (1937–1945). Pada 1949, berdirinya Tiongkok yang berada di bawah kepemimpinan Mao Zedong menjadi titik awal transformasi besar-besaran. Selama era Mao, fokus kebijakan Cina adalah pembangunan internal dan ideologi komunis., termasuk industrialisasi melalui *Great Leap Forward* dan reformasi sosial dalam *Cultural Revolution*. Meskipun kedua kebijakan ini gagal secara ekonomi dan menyebabkan kerusakan besar, mereka menciptakan landasan ideologis untuk penyatuan nasional dan stabilitas politik.

Cina mulai menunjukkan potensi sebagai kekuatan besar global setelah reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Deng Xiaoping pada 1978. Reformasi ini mencakup liberalisasi ekonomi, pengenalan mekanisme pasar dalam sistem sosialis dan pembukaan terhadap investasi asing. Strategi ini mendorong Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 9% selama beberapa dekade (Shambaugh, 2013). Pada abad ke-21, kebangkitan Cina semakin nyata melalui inisiatif seperti BRI yang memperkuat pengaruh ekonomi dan politiknya secara global. Selain itu, Cina juga meningkatkan kemampuan militernya, membangun kekuatan angkatan laut modern dan memperkuat perannya di organisasi internasional seperti PBB dan G20.

Sejarah Cina sebagai salah satu kekuatan besar dapat ditelusuri kembali pada Masa Dinasti Han (206 SM–220 M). Pada masa ini, Cina mencapai kemajuan besar dalam bidang administrasi, teknologi dan perdagangan yang memungkinkan interaksi dengan dunia luar melalui jalur sutra. Jalur ini menjadi penghubung utama antara Cina dan dunia Barat, memperkuat pengaruh ekonominya sebagai pusat perdagangan regional. Dinasti Tang (618–907 M) melanjutkan tradisi ini dengan memperkuat hubungan budaya dan ekonomi melalui jalur darat dan maritim, sementara Dinasti Song (960–1279 M) menjadi pelopor dalam inovasi teknologi, termasuk pencetakan dan kompas (Fairbank & Goldman, 2006).

Namun, invasi Mongol pada abad ke-13 dan kejatuhan Dinasti Ming (1368–1644) menandai awal dari masa-masa sulit bagi Cina. Meskipun Dinasti Qing (1644–1912) berhasil memulihkan stabilitas politik, dominasi asing melalui Perang

Opium (1839–1842; 1856–1860) dan kesepakatan tidak adil dengan negara-negara Barat membuat Cina kehilangan kedaulatan atas ekonominya.

Pada awal abad ke-20, kekuasaan Dinasti Qing runtuh akibat ketidakmampuannya menghadapi tekanan domestik dan eksternal. Revolusi 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat Sen mendirikan Republik Tiongkok, tetapi periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik, termasuk perang saudara antara Partai Nasionalis (Kuomintang) dan Partai Komunis Cina (PKC). Invasi Jepang selama Perang Dunia II semakin melemahkan negara, tetapi juga memperkuat komitmen PKC untuk merebut kekuasaan. Pada tahun 1949, PKC yang dipimpin oleh Mao Zedong mendirikan Tiongkok. Pemerintah baru ini menerapkan serangkaian kebijakan transformasi, termasuk kolektivisasi tanah dan industrialisasi cepat melalui program *Great Leap Forward* (1958–1962). Meski ambisius, kebijakan ini menyebabkan kelaparan massal dan kerusakan ekonomi. Periode berikutnya, *Cultural Revolution* (1966–1976), meskipun dimaksudkan untuk mereformasi ideologi masyarakat, menciptakan kekacauan sosial yang memperlambat pertumbuhan Cina (Lieberthal, 2004).

Langkah signifikan Cina menuju status *great power* dimulai pada era Deng Xiaoping (1978–1992), yang memperkenalkan reformasi ekonomi berbasis pasar. Reformasi ini melibatkan privatisasi sektor agrikultur, liberalisasi perdagangan, dan pembukaan zona ekonomi khusus (SEZ) seperti Shenzhen, yang menjadi pusat investasi asing. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan Cina hingga lebih dari 9% selama tiga dekade (Naughton, 2007). Selain ekonomi, Cina juga mulai memperkuat posisinya secara diplomatik dengan mendukung kebijakan

One-China Policy dan memainkan peran aktif dalam organisasi internasional seperti PBB. Cina juga meningkatkan investasi besar-besaran dalam modernisasi militer, yang menjadi bagian penting dari upayanya untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Pada abad ke-21, Cina meluncurkan inisiatif strategis seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) yang bertujuan memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di Asia, Afrika, dan Eropa. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas perdagangan global tetapi juga memperkuat peran Cina sebagai kekuatan ekonomi utama dunia. Cina juga mengembangkan teknologi canggih dan membangun sektor pertahanan modern, termasuk angkatan laut dan kemampuan ruang angkasa. Selain itu, investasi besar-besaran dalam pendidikan, infrastruktur, dan penelitian ilmiah membantu Cina memperluas daya saingnya di berbagai bidang, termasuk teknologi 5G dan kecerdasan buatan (Shambaugh, 2013).

2.2.2 Perkembangan Ekonomi dan BRI Cina

Pada masa Dinasti Han (206 SM–220 M), Cina mengembangkan ekonomi berbasis agrikultur dengan kemajuan teknologi irigasi dan pertanian. Melalui Jalur Sutra, Cina menjadi pusat perdagangan regional, mengekspor sutra, keramik, dan teh ke Timur Tengah dan Eropa. Perdagangan maritim mencapai puncaknya selama Dinasti Song (960–1279 M) yang menjadikan Cina kekuatan ekonomi global melalui inovasi teknologi dan birokrasi yang efisien. Namun, invasi Mongol dan kejatuhan Dinasti Ming melemahkan ekonomi Cina. Pada abad ke-19, Cina mengalami "abad penghinaan" karena kolonialisasi ekonomi oleh kekuatan Barat melalui Perjanjian Nanking tahun 1842 setelah Perang Opium. Sistem ekonomi

tradisional runtuh, dan ekonomi Cina menjadi tergantung pada perdagangan dengan negara asing (Fairbank & Goldman, 2006).

Setelah berdirinya Tiongkok pada 1949, pemerintahan Mao Zedong menerapkan sistem ekonomi terpusat berdasarkan ideologi komunisme. Kebijakan kolektivisasi tanah dan nasionalisasi industri besar-besaran dilakukan untuk membangun basis ekonomi sosialisme. Namun, program ambisius seperti *Great Leap Forward* (1958–1962) yang bertujuan mempercepat industrialisasi, justru membawa bencana. Krisis pangan besar-besaran menyebabkan jutaan kematian, dan ekonomi Cina jatuh ke titik terendah. Meskipun *Cultural Revolution* (1966–1976) bertujuan mereformasi ideologi masyarakat, kebijakan ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan ketidakstabilan politik. Selama periode ini, Cina tetap terisolasi dari ekonomi global (Lieberthal, 2004).

Perubahan besar dimulai pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi. Reformasi ini mencakup desentralisasi ekonomi, pembukaan terhadap investasi asing dan pembentukan zona ekonomi khusus (SEZ), seperti di Shenzhen. Deng memperkenalkan prinsip "sosialisme dengan karakteristik Cina," yang memungkinkan ekonomi pasar coexist dengan sistem politik komunis. Hasilnya, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 9% per tahun selama tiga dekade. Ekspor menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Cina, dengan fokus pada barang-barang manufaktur berbiaya rendah. Cina juga menjadi pusat produksi global karena investasi asing dari negara-negara maju, khususnya di sektor teknologi dan elektronik (Naughton, 2007).

Pada abad ke-21, Cina melampaui Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada 2010. Pada era ini, Cina mulai berfokus pada pengembangan sektor teknologi tinggi, urbanisasi besar-besaran, dan inisiatif global seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Selain itu, Cina juga memperkuat investasi domestik melalui proyek ambisius seperti pengembangan kota pintar, energi terbarukan, dan riset teknologi seperti kecerdasan buatan. Ekonomi Cina terus berkembang menjadi ekonomi berbasis inovasi, meskipun menghadapi tantangan seperti perang dagang dengan Amerika Serikat dan perlambatan pertumbuhan domestik (Summers, 2015).

Belt and Road Initiative (BRI), yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, memiliki akar pada sejarah geopolitik dan ekonomi Cina serta visi strategis untuk memperkuat pengaruh globalnya. BRI terinspirasi oleh Jalur Sutra kuno, yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa sebagai jalur perdagangan utama. Xi Jinping meluncurkan BRI sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas ekonomi dan diplomasi melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi lintas negara. Pada awalnya, inisiatif ini dirancang untuk mengatasi kelebihan kapasitas industri Cina di sektor seperti baja dan konstruksi, serta untuk memperluas akses ke pasar global (Rolland, 2017).

Secara strategis, BRI juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan jaringan mitra internasional yang terintegrasi dengan perekonomian Cina, sekaligus mengamankan jalur energi dan logistik yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina. BRI mencakup dua jalur utama, yaitu *Silk Road Economic Belt* di daratan

yang melintasi Asia Tengah menuju Eropa dan *21st Century Maritime Silk Road* yang melalui jalur laut menuju Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Kebijakan ini telah berkembang menjadi proyek global besar yang mencakup lebih dari 140 negara meski menghadapi kritik terkait transparansi, keberlanjutan utang dan pengaruh geopolitik Cina yang semakin dominan (Yu, 2017).

Xinjiang memainkan peran strategis dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) karena lokasinya yang berada di barat laut Cina, menjadi pintu gerbang ke Asia Tengah dan Eropa dalam proyek *Silk Road Economic Belt*. Sebagai wilayah terbesar di Cina yang berbatasan langsung dengan delapan negara, termasuk Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Pakistan, Xinjiang memiliki posisi geografis yang strategis untuk menghubungkan jalur darat BRI dengan negara-negara mitra di Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Jalur-jalur kereta api dan jalan raya utama yang menghubungkan Cina dengan negara-negara Eurasia sebagian besar melintasi Xinjiang, menjadikan wilayah ini elemen kunci dalam memperkuat konektivitas regional yang diusung BRI (Rolland, 2017).

Dalam konteks BRI, Cina telah berinvestasi besar-besaran di Xinjiang untuk membangun infrastruktur yang mendukung ambisi globalnya. Proyek seperti jalur kereta api Kashgar–Gwadar, yang menghubungkan Xinjiang dengan pelabuhan strategis Gwadar di Pakistan melalui Koridor Ekonomi Cina-Pakistan “*China-Pakistan Economic Corridor*” (CPEC), menunjukkan peran penting Xinjiang dalam mengamankan jalur perdagangan ke Asia Selatan dan Timur Tengah (Hillman, 2020). Selain itu, Xinjiang juga menjadi pusat bagi pipa gas dan minyak yang membawa sumber energi dari Asia Tengah ke kawasan pesisir Cina, memperkuat

keamanan energi nasional Cina. Dalam visi jangka panjang, pembangunan infrastruktur ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mengintegrasikan Xinjiang lebih erat dengan ekonomi regional dan global melalui jaringan BRI (Yu, 2017).

Melalui BRI, Cina juga berupaya mengintegrasikan ekonomi Xinjiang dengan negara-negara tetangganya di Asia Tengah. Kota-kota seperti Kashgar dan Urumqi telah diposisikan sebagai pusat perdagangan internasional, dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan zona perdagangan bebas. Misalnya, Urumqi menjadi tuan rumah pameran perdagangan internasional yang mempertemukan negara-negara Asia Tengah dengan investor Cina, menunjukkan upaya untuk menjadikan Xinjiang sebagai pusat ekonomi transregional. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga memperkuat posisi strategis Cina di Asia Tengah melalui keterlibatan ekonomi yang lebih erat (Yu, 2017).

Secara keseluruhan, Xinjiang adalah elemen kunci dalam pelaksanaan BRI karena lokasinya yang strategis, perannya sebagai jalur utama perdagangan dan energi, serta potensinya sebagai pusat ekonomi regional. Namun, tantangan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut menjadikan Xinjiang salah satu fokus utama kebijakan domestik Cina. Dalam konteks ini, BRI bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur atau perdagangan internasional, tetapi juga mencerminkan upaya Pemerintah Cina untuk memperkuat kontrol dan stabilitas di wilayah yang dianggap vital bagi ambisi globalnya.

2.3. Dunia Internasional sebagai Sistem Anarki

Dunia internasional memiliki tanggapan yang beragam terhadap kebijakan Cina di Xinjiang. Beberapa negara, terutama dari dunia Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan anggota Uni Eropa, secara aktif mengecam tindakan Cina terhadap masyarakat Uighur. Mereka menggambarkan hal tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan dalam beberapa kasus disebut sebagai genosida budaya (Roberts, 2020). Negara-negara ini telah menggunakan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengangkat isu Xinjiang, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam perlakuan Cina terhadap etnis Uighur. Amerika Serikat, misalnya, telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pejabat Cina yang terlibat dalam kebijakan di Xinjiang serta melarang impor barang yang dianggap berasal dari kerja paksa di wilayah tersebut (Zenz, 2019).

Namun, tanggapan ini tidak universal. Banyak negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah menunjukkan sikap mendukung atau netral terhadap kebijakan Cina di Xinjiang. Dukungan ini sebagian besar berasal dari hubungan ekonomi yang erat melalui BRI. Cina berhasil memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk membangun aliansi politik yang kuat di antara negara-negara ini. Sebagai contoh, dalam pertemuan PBB, beberapa negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Rusia mendukung narasi Cina bahwa kebijakan di Xinjiang adalah bagian dari upaya melawan terorisme dan ekstremisme (Clarke, 2011).

Beberapa langkah konkret telah diambil oleh dunia internasional untuk merespons permasalahan di Xinjiang. Selain sanksi ekonomi dan diplomasi

tekanan, beberapa negara Barat telah memboikot acara seperti Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 sebagai protes simbolis terhadap kebijakan Cina. Parlemen di beberapa negara, seperti Kanada, Belanda, dan Inggris, juga telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Cina di Xinjiang sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Selain itu, organisasi non-pemerintah (NGO) internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, terus mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran di Xinjiang dan menekan pemerintah negara-negara lain untuk bertindak lebih tegas (Millward, 2007).

Namun, efektivitas langkah-langkah ini terbatas karena sifat anarki dalam sistem internasional. Sanksi ekonomi, meskipun memberikan tekanan, tidak cukup signifikan untuk mengubah kebijakan Cina, terutama karena Cina berhasil mendiversifikasi mitra dagangnya ke negara-negara yang kurang kritis terhadap kebijakan domestiknya. Selain itu, dukungan dari negara-negara berkembang melalui BRI membantu Cina memitigasi isolasi diplomatik yang dicoba diterapkan oleh negara-negara Barat (Clarke, 2011).

Meskipun ada tekanan internasional, kebijakan Cina di Xinjiang tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan signifikan. Pemerintah Cina secara konsisten menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mempertahankan narasi bahwa kebijakan mereka adalah langkah yang sah untuk melawan ekstremisme dan menjaga stabilitas. Cina juga memanfaatkan pengaruhnya di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi resolusi atau investigasi internasional terkait Xinjiang. Bahkan, dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, Cina berhasil membangun

aliansi strategis yang memperkuat posisinya di arena internasional (Mearsheimer, 2001).

Selain itu, kampanye diplomatik Cina yang aktif, termasuk mengundang diplomat asing untuk mengunjungi Xinjiang di bawah pengawasan ketat, bertujuan untuk mengontrol narasi global. Pendekatan ini cukup berhasil, terutama di negara-negara yang bergantung pada investasi Cina. Pengaruh internasional terhadap kebijakan domestik Cina, termasuk di Xinjiang, tetap minimal karena posisi Cina yang kuat dalam sistem internasional yang anarki dan tidak adanya otoritas global yang mampu memaksakan perubahan (Waltz, 1979).

Tanggapan dunia internasional terhadap permasalahan Xinjiang mencerminkan keterbatasan sistem internasional dalam menangani isu-isu yang melibatkan negara besar seperti Cina. Meskipun ada upaya dari negara-negara Barat untuk memberikan tekanan melalui sanksi dan kritik diplomatik, Cina tetap mampu mempertahankan kebijakan represifnya berkat kekuatan ekonomi, pengaruh politik, dan dukungan dari negara-negara berkembang. Tanggapan terhadap isu Xinjiang menunjukkan bahwa dalam sistem dunia internasional yang anarki, tidak ada entitas berkuasa yang dapat mengatasi permasalahan semacam ini. Tidak ada hirarki yang jelas dan dapat mengatur permasalahan di Xinjiang ini. Maka dari itu, negara mencoba untuk melindungi diri mereka masing-masing bagaimanapun caranya.